

SKRIPSI

PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

NUR ASHILATU THAAHIRA

E041191059

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019 DI KECAMATANTONDONG TALLASA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan Diajukan Oleh :

NUR ASHILATU THAAHIRA

E041191059

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

NIP. 19710917 199703 1 001

Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP

NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN TONDONG TALLASA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disusun dan Diajukan Oleh :

NUR ASHILATU THAAHIRA

E041191059

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. ()

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. ()

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. ()

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. ()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ashilatu Thaahira

NIM : E041191059

Jenjang Pendidikan : Strata Satu

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2023



(NUR ASHILATU THAAHIRA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Tak lupa juga, penulis haturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sang kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa dan berperan besar di dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak Haedar, S.Pd dan Ibu Hajar, A.Md. Ak yang telah menjadi orang tua terbaik, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si dan Ibu Ummi Suci Fahia Bailusy, S.IP., M.IP yang telah dengan sabar membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M. A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.

6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Gustiana A Kambo, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Prof. Dr. Muhammad M.Si., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Departemen Ilmu Politik angkatan 2019, terutama kepada sahabat dekat penulis yaitu Rista Ilma, Risda Amalia, Riri Gloria, Miftahul Karima, Muhammad fadel, dan Muhammad Irfan.
10. Seluruh teman-teman Diplomasi 2019, yang telah kebersamai di Himapol hingga akhir, saudari Nurul Aulia Ramadani, Desi Rahayu, Adinda muthia, Adinda Ardhiyah, Muh Yusril Hidayatullah, Ibnu, Nur hidayat, Rif'atul, Resky erik, Muh Aqsal, dll.

11. Seluruh teman-teman KKN UNHAS Gel 108 Pangkep, Kelurahan Talaka Posko 2 : Riri, Dara, Mely, Evo, Wahid, Ikky, dan Kevin, terimakasih atas cerita-cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama melaksanakan KKN.
12. Seluruh sahabat dekat penulis, Rezki Amaliah Sabar, Rezky Dwi Aulia, Fahira Arifin, Nurhikmayani, Fitrah Ramadani, Mahdaniar, Muhammad Attariq, Dedi Agustiadi, Kaceng, terima kasih selalu mendengar curhatan, keluh kesah dan selalu mendampingi penulis mengurus skripsi ini dari pertama hingga akhir.
13. Seluruh keluarga penulis, Winda Namrianty, Nurul Utami, Anugrah Awaliah, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
14. Kepada Kak Moris Mundi, S.IP. yang selalu membantu penulis dalam penyusunan proposal hingga skripsi ini, terima kasih atas bantuan yang begitu tulus, semoga apa yang diinginkan segera terwujud.
15. Kepada CBR, terima kasih karena selalu mendengarkan cerita-cerita pada masa penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menebar kebaikan, telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.

16. Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih untuk tetap kuat dan sabar selama perkuliahan hingga akhir, terima kasih untuk tetap berdiri sendiri, dan terima kasih atas usaha, perjuangan, dan doa yang selama ini dipanjatkan, terima kasih karena tetap bertahan meskipun keadaan jatuh bangun.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini

Makassar, 25 Januari 2023

NUR ASHILATU THAAHIRA

ABSTRAK

NUR ASHILATU THAAHIRA. NIM E041191059. PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. Di bawah bimbingan Muhammad dan Ummi Suci Fathia Bailusy.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di kecamatan Tondong Tallasa kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menyelenggarakan pemilu yang ideal di Kabupaten Pangkep, hal ini tidaklah lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep bersama para pemangku kepentingan pemilu.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data lapangan yang didapatkan kemudian disimpulkan dan dibahas dalam kerangka teoritis partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Pertama, faktor kesadaran politik masyarakat untuk memberikan hak suara pada pemilihan umum tahun 2019. Kesadaran politik masyarakatnya ini tidak murni karena kesadaran diri sendiri akan memilih, tetapi kesadaran politik masyarakat terbentuk karena faktor sosialisasi dari KPU dan kampanye yang menarik dari calon kandidat yang menjanjikan perubahan untuk kecamatan Tondong Tallasa. Kedua, faktor penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara berperan penting pada pemilihan umum tahun 2019, salah satu sosialisasi yang dilaksanakan KPU Pangkep adalah melaksanakan forum terbuka dan melaksanakan goes to school di setiap sekolah-sekolah. Bukan hanya KPU saja, tetapi ada juga peran dari pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan Tondong Tallasa bagaimana agar masyarakat Tondong Tallasa ini datang langsung untuk memilih.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Kesadaran Politik, Penyelenggara Pemilu

ABSTRACT

NUR ASHILATU THAAHIRA. NIM E041191059. VOTER PARTICIPATION IN THE 2019 ELECTION IN TONDONG TALLASA DISTRICT, PANGKAJENE AND ARCHIPELAGO REGENCY. Under the guidance of Muhammad and Ummi Suci Fathia Bailusy.

This study aims to find out how voter participation is in the 2019 elections in the Tondong Tallasa sub-district, Pangkajene and Islands districts. This study used qualitative research methods. The data obtained using interviews and documentation. To hold an ideal election in Pangkep Regency, this cannot be separated from the role of the General Election Commission of Pangkep Regency together with election stakeholders.

The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection is done through interviews and documentation. The field data obtained is then summarized and discussed in the theoretical framework of political participation in the 2019 elections.

The results of this study indicate that there are 2 (two) factors that influence the increase in voter turnout in the 2019 elections in the Tondong Tallasa sub-district, Pangkep Regency. First, the factor of public political awareness to give voting rights in the 2019 general election. This political awareness of the people is not purely because of self-awareness that they will vote, but the political awareness of the people is formed because of the socialization factor from the KPU and an interesting campaign from potential candidates who promise changes to Tondong Tallasa district. Second, the organizer factor, the KPU as the organizer plays an important role in the 2019 general election, one of the socialization carried out by the Pangkep KPU is to hold an open forum and carry out goes to school in every school. Not only the KPU, but there is also the role of the local government and the Tondong Tallasa sub-district government in how to make the people of Tondong Tallasa come directly to vote.

Keywords: Voter Participation, Political Awareness, Election Organizers

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pendekatan Behavioral.....	8
2.2 Partisipasi Politik	11
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19
2.4 Kerangka Berpikir	22
2.5 Skema Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan, Tipe, dan Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Informan Penelitian.....	28
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	32
4.1 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	32
4.2 Kecamatan Tondong Tallasa.....	36
4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	37

4.4 Jumlah Daftar Data Pemilih Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	38
4.5 Jumlah Daftar Pengguna Hak Pilih	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
5.1 Faktor Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	40
5.1.1 Faktor Kesadaran Politik Masyarakat.....	42
5.1.2 Faktor Penyelenggara dan Peran KPU dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat	47
BAB V PENUTUP	53
6.1 Kesimpulan.....	53
6.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Partisipasi Pemilu 2014 di Kabupaten Pangkep	4
Tabel 1.2 Data Partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Pangkep	5
Tabel 4.1 Data Penduduk Kabupaten Pangkep (Berdasarkan Jenis Kelamin) Tahun 2019	37
Tabel 4.2 Data Pemilih Kabupaten Pangkep Tahun 2019.....	38
Tabel 4.3 Data Pengguna Hak Pilih Kabupaten Pangkep Tahun 2019.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara langsung bersama Burhan A, SH (Ketua KPU Kabupaten Pangkep).....	58
Dokumentasi 2. Wawancara langsung bersama Saiful Mujib (Koord Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pangkep)...	59
Dokumentasi 3. Wawancara langsung bersama Samsir Salam, S.Ag, M.H (Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep).....	60
Dokumentasi 4. Wawancara langsung bersama Muhammad Imran Fattah, SE (Camat Tondong Tallasa).....	61
Dokumentasi 5. Wawancara langsung bersama Maslam Gappa (PPK 2019 Kecamatan Tondong Tallasa).....	62
Dokumentasi 6. Wawancara langsung bersama Muhammad Asrar (pemilih pemula tahun 2019).....	63
Dokumentasi 7. Wawancara langsung bersama Muhammad Kasim (pemilih pemula tahun 2019).....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik adalah suatu bentuk tindakan seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan umum baik itu secara langsung atau tidak langsung. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah seperti memberikan suara pada pemilu, mengadakan lobbiving dengan pejabat atau anggota yang ada diparlemen, menjadi anggota partai lainnya.¹

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa

¹ Office, s.b. (2021). Partisipasi Warga dalam Proses Politik. P. 1

tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping *stakeholder* yang lain.²

Jika dikaitkan dengan norma dan adat istiadat yang masih digunakan dan dipakai masyarakat tondong tallasa, ini salah satu yang mendorong masyarakat tidak abai terhadap pemilu apalagi pemilih pemula, masih Sebagian besar yang memilih karena mengikuti pilihan orang tuanya. Sebagian besar mata pencaharian di Kecamatan Tondong Tallasa yaitu Bertani dan berkebun, maka dari itu masyarakat Tondong Tallasa hanya berpatokan pada ketokohan. Seperti camat, kepala desa, dan lain-lain.

Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil tema tentang partisipasi politik dalam Pemilu 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa

² Adminsentelo. (n.d). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Kapanewon Sentelo.

Kabupaten Pangkep. Pertama, adanya peningkatan partisipasi politik dalam Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 partisipasi politik Kecamatan Tondong Tallasa data pemilihnya sebanyak 7.204, pengguna hak pilihnya sebanyak 5.254, dan persentase partisipasinya sebesar 73%. Pada Pemilu 2019 partisipasi politik di Kecamatan Tondong Tallasa data pemilihnya sebanyak 7.657, pengguna hak pilihnya 6.381, dan persentase partisipasinya sebanyak 83.34%.

Kedua, sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian mengenai partisipasi politik pada Pemilu 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian baru untuk bisa kita jadikan bahan pembelajaran kedepan terkait penelitian yang sejenis. Partisipasi politik 2014 lebih bersifat apatis yang artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik. Ini dilihat dari menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Kondisi itu setidaknya dapat terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif sebelumnya. Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu itu setidaknya juga tergambarnya dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2013. Setidaknya angka partisipasi politik masyarakat dalam pilkada berkisar antara 50-70 persen. Seluruh elemen bangsa ini tentu berharap partisipasi politik masyarakat akan tetap tinggi pada Pemilu 2014, baik secara kuantitas maupun kualitas.³ Terlebih lagi di Kecamatan Tondong Tallasa latar belakang pendidikannya Sebagian besar hanya sampai Sekolah Menengah Atas dan masih kurang memahami mengenai Pemilu apalagi untuk pemilih pemula.

Ketiga, Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi masyarakat Kabupaten

³ Arman Ndupa. (2014). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014. Dalam DetikNews, 24 Januari 2014.

Pangkep. Pada tahun 2019 masyarakat melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemilihan anggota DPR dan DPRD. Tentunya perhatian masyarakat pada dunia politik cukup tinggi. Situasi ini akan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi politik di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan tiga alasan yang telah dikemukakan di atas maka terdapat ruang kosong terkait belum diketahuinya faktor-faktor untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Berikut data partisipasi Pemilu 2014 di Kabupaten Pangkep:

No	Kecamatan	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih
1.	Liukang Tangaya	12.642	9.316	74%
2.	Liukang Kalmas	8.900	6.374	72%
3.	Liukang Tupabbiring	12.294	9.258	75%
4.	Pangkaje'ne	33.030	23.201	70%
5.	Balocci	11.561	8.451	73%
6.	Bungoro	30.685	21.790	71%
7.	Labakkang	36.757	22.882	62%
8.	Ma'rang	25.528	15.972	63%
9.	Segeri	17.402	10.309	59%
10.	Minasate'ne	25.103	18.252	73%
11.	Mandalle	10.999	6.568	60%
12.	Tondong Tallasa	7.204	5.254	73%
13.	Liukang Tupabbiring Utara	9.449	6.755	71%
Jumlah		241.554	164.382	68%

Tabel 1.1 Data Partisipasi Pemilu 2014 di Kabupaten Pangkep

Sumber: KPU Kabupaten Pangkep, 2014.

Berikut data Pemilu 2019 di Kabupaten Pangkep:

No.	Kecamatan	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih
1.	Liukang Tangaya	13.632	10.254	75.22%
2.	Liukang Kalmas	9.264	7.330	79.12%
3.	Tupabbiring	12.737	10.465	82.16%
4.	Tupabbiring Utara	9.883	7.657	77.48%
5.	Balocci	12.224	9.840	80.50%
6.	Pangkaje'ne	34.172	27.906	81.66%
7.	Minasate'ne	27.231	21.967	80.67%
8.	Bungoro	32.143	25.965	80.78%
9.	Labakkang	37.633	28.694	76.25%
10.	Ma'rang	26.051	19.120	73.39%
11.	Segeri	15.225	11.938	78.41%
12.	Mandalle	10.952	7.573	69.15%
13.	Tondong Tallasa	7.657	6.381	83.34%
Jumlah		248.804	195.090	78.41%

Tabel 1.2 Data Partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Pangkep

Sumber: KPU Kabupaten Pangkep, 2019.

Dari data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Pangkep di atas, Kecamatan lain di Kabupaten Pangkep juga meningkat dari Pemilu 2014 sebelumnya, tetapi Kecamatan Tondong Tallasa yang tingkat partisipasi pemilihnya paling meningkat dibandingkan Kecamatan yanglainnya.

Tondong tallasa sendiri adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pangkep. Daerah ini termasuk daerah pegunungan yang jauh dari perkotaan dan susah mengakses jaringan, perjalanan ke sanapun termasuk sulit untuk dilalui karena sempit dan banyak jalanan yang sudah rusak. Ada beberapa desa di Kec Tondong Tallasa, yaitu Desa Bulu Tellue, Desa Malaka, Desa

Bantimurung, Desa Tondongkura, Desa Lanne, dan Desa Bonto Birao. Di Kecamatan Tondong Tallasa juga banyak destinasi wisata alam yang sering dikunjungi masyarakat Kabupaten Pangkep maupun masyarakat dari luar.

Hal inilah yang kemudian mendorong saya merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena disaat wilayah lain mendapat kesulitan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya, Kecamatan Tondong Tallasa yang terbilang desa yang jauh dari perkotaan dan susah mengakses jaringan masih bisa mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep pada pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu : untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep pada pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilakukan agar pembaca mengetahui bahwa masalah yang diteliti atau ditulis oleh penulis penting diketahui pembaca. Di samping itu, memberikan keyakinan kepada pihak penulis bahwa masalah yang dipilih dan layak untuk diketahui.

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka pengembangan Ilmu politik serta memperkaya kajian terkait kepemiluan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan pemilu.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak public yang memiliki minat pada kepemiluan. Terkhusus para mahasiswa ilmu politik yang ingin memperkaya wawasan pengetahuan dan para politisi yang terlibat aktif dalam partai politik.

Peneliti berharap juga dapat mengukur bagaimana tingkat ketertarikan pemilih dalam menghadapi pemilu 2019 di Indonesia dan bisa mengetahui peran iklan layanan masyarakat di dalam kehidupan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang erat kaitannya dengan partisipasi politik dalam pemilu 2019 dan hal tersebut akan dijadikan kerangka pikir dalam pembahasan selanjutnya. Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan beberapa teori dan konsep berkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan menguraikan mengenai partisipasi politik dan pemilihan umum.

2.1 Pendekatan Behavioral

Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Burrhus Frederic Skinner. Behaviorisme lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan. Terapi perilaku ini lebih mengkonsentrasikan pada modifikasi tindakan, dan berfokus pada perilaku saat ini daripada masa lampau. Belakangan kaum behavioris lebih dikenal dengan teori belajar, karena menurut mereka, seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan.

Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak memiliki bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan di sekitarnya. Menurut Corey (2003: 198) menyatakan bahwa pendekatan behavior tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap manusia dipandang memiliki kecenderungan-kecenderungan positif dan negative yang sama.

Manusia pada dasarnya di dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Segenap tingkahlaku manusia itu dipelajari.

Sementara itu, Winkel (2004: 420) menyatakan bahwa konseling behavioristik berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian bersifat psikologis, yaitu:

1. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek.
2. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkahlakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya, dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri.
3. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri suatu pola tingkahlaku yang baru melalui proses belajar.
4. Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi oleh perilaku orang lain.

Berdasarkan dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia pada pandangan behavioris yaitu pada dasarnya manusia tidak memiliki bakat apapun, semua tingkahlaku manusia adalah hasil belajar. Manusia pun dapat mempengaruhi orang lain, begitu pula sebaliknya. Manusia dapat menggunakan orang lain sebagai model pembelajarannya.⁴

Konsep dasar yang dipakai oleh *Behavior Therapy* adalah belajar. Belajar yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan bukan karena kematangan. Teori Belajar yang dipakai dalam pendekatan ini sebagai aplikasi dari percobaan-percobaan tingkah laku dalam laboratorium. Manusia

⁴ Missscounseling. (2011). Pendekatan Behavior. Dalam Blogspot.com pada 13 April 2011.

merupakan makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar.

Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar: Pembiasaan klasik Pembiasaan operan Peniruan. Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi- kondisi pembentukan tingkah laku. Adapun karakteristik konseling behavioral adalah:berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik Memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling Mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Penilaian yang obyektif terhadap tujuan konseling.

Kaum behavioris tidak menjelaskan struktur kepribadian seperti pada aliran lain seperti psikoanalisis, tetapi menurut teori kepribadian behavioristik bahwa kepribadian manusia adalah perilaku organisme itu sendiri. Dengan kata lain bahwa kepribadian manusia dapat di ketahui melalui tingkahlaku yang tampak dan diamati (*observable behavior*). Selain itu ada pandangan dualiasme yang berkembang dalam pendekatan behavior bahwa manusia memiliki jiwa, raga, mental, fisik, sikap, perilaku, dan sebagainya. Seperti yang dijabarkan di bawah ini:

1. Lingkungan dan pengalaman menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang dibentuk.
2. Dualisme, seperti jiwa-raga, raga-semangat, raga-pikiran bukan merupakan validitas keilmuan pada pembentukan, prediksi dan kontrol dari perilaku manusia.
3. Walaupun pembentukan kepribadian memiliki batasan genetik namun efek dari lingkungan dan stimulus dari dalam memiliki pengaruh dominan.
4. Dalam membentuk sebuah teori dari kepribadian prediksi dan kontrol dan perilaku merupakan hal terpenting. Tidak ada yang lebih penting selain kebebasan dalam penentuan respon. Semua perilaku dapat dipisah menjadi *operant respondent* yaitu individual respon yang berbeda dalam pengaruh kontrol dari stimulus lingkungan.⁵

Teori ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik termasuk partisipasi politik karena merupakan bagian dari perilaku politik.

2.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

⁵ Jumadi Tuasikal. (2022). *Konseling Behavior*.

Menurut Huntington dan Nelson, dua kriteria penjelas dari partisipasi politik sebagai berikut :

1. Dilihat dari ruang lingkup atau proposisi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus bagi system politik. Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan dalam hubungan “Berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya jika ruang lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh, kegiatan kelompok kepentingan.⁶

2.1.1 Faktor Partisipasi Politik

Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, partisipasi politik memiliki tiga factor utama yang berpengaruh, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, factor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membiarkan isu mengenai politik.

⁶ Alfred, Yurnie, Jones. (2018). Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilu Legislatif 2014 di Distrik Ayamaru Kota. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Hal. 3.

2. Faktor Ekonomi atau Rasional

Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pemilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya.

3. Faktor Sosiologis

Faktor ini meliputi aspek agama, Pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan.⁷

2.1.2 Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. *Apatis*: artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik.
2. *Spectator*: artinya masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum.
3. *Gladiator*: artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.

⁷ Vanya Karunia Mulia Putri. (2021). Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor, dan Bentuk. Dalam Kompas.com.

Menurut Huntington dan Nelson, ada dua jenis partisipasi politik, yaitu :

1. Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat karena partisipasi ini memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang sesuatu kepada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, dan memberikan haknya pada pemilihan umum yang dimana hal ini diinginkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Partisipasi mobilisasi adalah jenis partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam hal ini partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain (*state* maupun *private*) menjadi sangat signifikan terhadap partisipasi politik atau kelompok.⁸

Dalam hal ini mungkin dapat dikatakan bahwa dalam hampir setiap kegiatan partisipasi ada unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di negara-negara demokrasi Barat tekanan semacam ini jauh lebih sedikit dibanding dengan di negara-negara otoriter. Di negara-negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagi bobot dan takaran.

Ada pula pendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti

⁸ Ngadisah dan Dodi Riyadmaji. (2018). Partisipasi Politik Pemilih dalam Pilkada Serentak 2018. Dalam S. Muslim. Plan C Institute.

demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain-lain, merupakan suatu bentuk partisipasi.⁹

Sistem politik demokrasi membutuhkan partisipasi politik agar berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, terlepas dari ras, kelas, atau karakteristik seseorang, ada sejumlah cara berbeda di mana setiap orang dapat terlibat dalam partisipasi politik. Faktanya, dalam kasus tertentu, mencampuri partisipasi politik seseorang bisa jadi merupakan kejahatan. Misalnya, setelah Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 disahkan oleh Kongres, mencegah atau mengecilkan hati warga negara Amerika untuk memberikan suara adalah suatu kejahatan dan melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.¹⁰

1. Pemilihan Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan Lembaga demokrasi.

⁹ Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹⁰ Angga Sopiana. (2022). Bentuk-Bentuk dari Partisipasi Politik. Dalam Sridianti.com

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting.

Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau system kenegaraan.

2. Tujuan Pemilu

Dalam pelaksanaannya pemilu memiliki lima tujuan:

a. Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

b. Pemilu sebagai Sarana Membentuk Perwakilan Politik.

Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam Lembaga perwakilan rakyat.

- c. Pemilu sebagai Sarana Pengganti Pemimpin Secara Konstitusional.

Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin Kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti.

- d. Pemilu sebagai Sarana Pemimpin Politik Memperoleh Legitimasi

Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat.

- e. Pemimpin sebagai Sarana Partisipasi Politik Masyarakat.

Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan public melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji Ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka

mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945.

3. Asas-Asas Pemilu

Dalam pelaksanaannya, pemilu harus menggunakan beberapa asas,yaitu;

a. Umum

Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain.

b. Langsung

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara.

c. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.

d. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku.

e. Adil

Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas keurangan dari pihak manapun.

f. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun.¹¹

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang dimana berisi tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, Diki Kurniawan, dkk, 2017 dalam skripsi berjudul "Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Bupati Konawe Selatan Tahun 2015". Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak KPU telah menggunakan berbagai macam strategi komunikasi yang meliputi sosialisasi pemilu kepada secara langsung kepada masyarakat; penggunaan media sosial dan media lokal; seleksi media yang memberikan dampak bagi partisipasi politik masyarakat. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada tiap sekolah-sekolah yang mana sasarannya yakni para pemilih pemula agar memahami pengetahuan menyangkut

¹¹ Serafica Gischa. (2020). Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas, dan Tujuan. Dalam Kompas.com.

pemilu secara umum dan pilkada Kabupaten Konawe.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, Eko Ari, dkk. 2019 dalam skripsi berjudul “Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak di Kota Malang”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Magelang menerapkan strategi ofensif dan defensif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik pada pilkada serentak tahun 2015. Pelaksanaan strategi ofensif dilaksanakan melalui program-program baru yang selama ini belum pernah dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi sebelumnya. Sedangkan strategi defensif yakni melakukan program yang sudah ada dan berjalan sebelumnya. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan melakukan kerjasama dengan kader penggerak PKK dan juga kepada beberapa ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan beberapa ormas lainnya serta memanfaatkan beberapa media khususnya radio lokal serta bekerja sama dengan instansi lain seperti perguruan tinggi dan instansi pemerintah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Novianty, Fety, dan Erna Octavia, 2018. Dalam skripsi berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak memiliki beberapa kegiatan atau program kerja yang menyangkut sosialisasi pemilu khususnya yang dilaksanakan kepada pelajar SMA dan Mahasiswa di Kota Pontianak. Hambatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

minimnya kesadaran dari pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU dan komitmen para SDM pegawai di KPU yang kurang optimal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eta Yuni Lestari. (2018). Dalam skripsi berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penelitian ini dilakukan dalam konteks mendeskripsikan fenomena partisipasi politik khususnya pada pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota Semarang tahun 2015. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan yakni meliputi visi misi calon kandidat, latar belakang pendidikan calon, kedekatan calon dengan masyarakat, kinerja atau pengalaman calon selama ini, dan kepribadian calon seperti jujur, amanah, dan merakyat.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Loina Lalolo Krina Perangin-angin. (2018). Dalam skripsi berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penelitian ini berusaha untuk bagaimana mengidentifikasi jaringan sosial para pemilih pemula di dalam media sosial serta pengaruhnya pada partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial yang dimiliki oleh pemilih pemula dapat menjadi media interaksi dan komunikasi pendidikan politik dan upaya kampanye politik dari salah satu calon kandidat atau partai politik tertentu dalam rangka mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula.

Dari kelima penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, bagaimana bisa di wilayah ini partisipasi pemilihnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Kabupaten Pangkep.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara pada wujud keikutsertaan warga negara dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik. Bentuk pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh warga negara bukan seorang politisi atau pegawai negeri maupun partai politik yang berkuasa, partisipasi politik dilakukan oleh warga negara yang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan, baik dari segi kebijakan yang buat oleh pemerintah atau dalam pemberian suara dalam pemilu. Hal itu dilakukan agar terciptanya sebuah tatanan negara demokrasi yang di idam idamkan oleh sebuah negara.

Pada dasarnya, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan warga negara tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara.

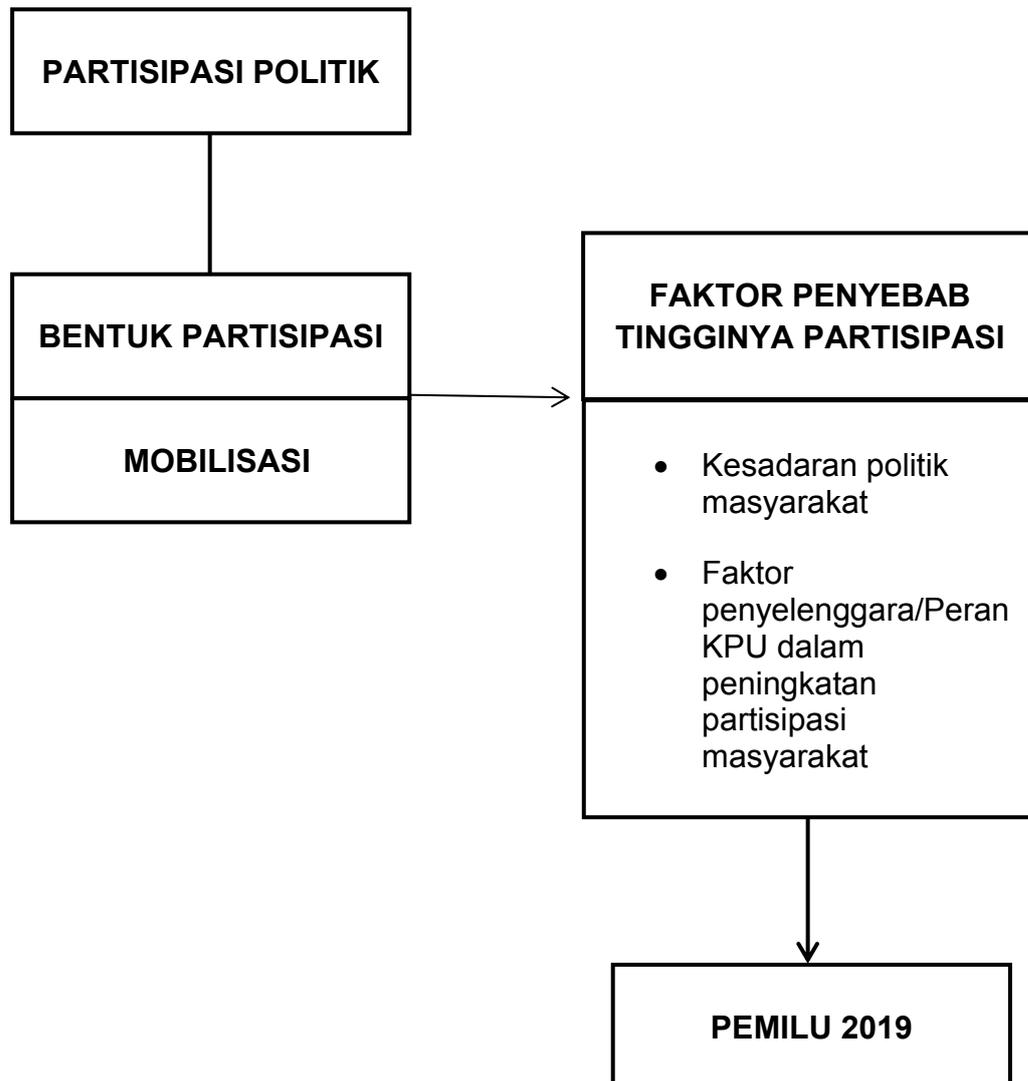
Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu

maupun kolektif, yang didasari secara sukarela maupun dorongan dari pihak lain yang bertujuan mempengaruhi segala keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik sangatlah diperlukan oleh setiap warga negara, hal itu dilakukan agar mereka mampu ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk menjalankan perannya sebagai warga negara.

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum yang cukup tinggi yaitu sebesar 78,41 persen pada pemilu 2019. Dengan perolehan tersebut menjadikan kabupaten Pangkep menduduki urutan pertama sebagai wilayah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemilu. Terutama di wilayah kecamatan Tondong Tallasa yang merupakan wilayah pegunungan.

Jika dikaitkan dengan adat istiadat yang masih digunakan dan dipakai masyarakat tondong tallasa, ini salah satu yang mendorong masyarakat tidak abai terhadap pemilu. Partisipasi tinggi bisa juga dikaitkan karena masyarakat tondong tallasa masih kental dengan ketokohan. Seperti camat, kepala desa, dan lainnya.

2.5 Skema Penelitian



Gambar 2.1 Skema Penelitian